



► PENYERAHAN SPPT

BPKAD Jogja Optimalkan Target PBB

UMBULHARJO—Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023 lebih awal kepada lurah untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai upaya mengoptimalkan realisasi target pajak pada tahun ini.

"Target seluruh pajak daerah pada tahun ini, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dinaikkan karena kondisi perekonomian mulai pulih dan kami tidak lagi menerapkan kebijakan penangguhan atau keringanan pajak," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja

Wasesa di Jogja, Senin (2/1).

Dari 96.426 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB yang diterbitkan pada tahun ini, Pemerintah Kota Jogja memasang target penerimaan daerah dari PBB sebesar Rp104 miliar atau lebih tinggi dibanding realisasi pada 2022 sebesar Rp99,5 miliar.

Jika mengacu pada realisasi tahun sebelumnya, Wasesa optimistis target pajak yang ditetapkan bisa tercapai meskipun masih ada beberapa kendala terkait pemungutan PBB yang harus diantisipasi. Realisasi pada 2022 hingga 31 Desember tersebut lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan sebesar Rp94

miliar.

Kendala yang harus diantisipasi di antaranya, kebiasaan wajib pajak yang memilih membayar pajak mendekati jatuh tempo dan ada wajib pajak yang berdomisili di luar daerah sehingga penyampaian SPPT PBB terlambat.

BPKAD Kota Jogja menargetkan, seluruh wajib pajak di Kota Jogja sudah menerima SPPT PBB paling lambat pada akhir Maret. Pada 2023, BPKAD Kota Jogja juga menurunkan stimulus untuk PBB dari tahun sebelumnya sebesar 30% menjadi 25%.

Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi mengimbau seluruh lurah untuk segera mendistribusikan SPPT PBB tersebut ke wajib

pajak dan wajib pajak langsung memenuhi kewajiban dengan membayar pajak tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo.

Penerimaan pajak daerah, lanjut Sumadi menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Jogja untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan sehingga pemerintah tidak selalu mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat.

Pembayaran PBB di Kota Jogja sudah bisa dilakukan secara daring melalui sejumlah bank yang bekerja sama, hingga pembayaran di Kantor Pos, melalui aplikasi uang elektronik, hingga penyelenggaraan kegiatan jemput bola di beberapa lokasi.

(Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005